

## RINGKASAN

### KORUPSI POLITIK DAERAH:

#### Studi Jejaring Politik, Politik Nepotisme dan Perlawanan Rakyat dalam pemilihan Kepala Daerah

Rachman Sidharta Arisandi

Penerapan pemilihan kepala daerah langsung dimaksudkan untuk meningkatkan legitimasi kepala daerah. Namun demikian, ternyata tercemari oleh berbagai bentuk korupsi politik. Banyak pemilihan kepala daerah tidak hanya diwarnai dengan praktik politik uang, tetapi juga ditandai oleh praktik-praktik politik kolusionisme, politik dinasti, dan politik nepotisme. Kalau praktik politik uang telah menggejala saat kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka praktik politik kolusionis, politik dinasti, dan politik nepotisme, misalnya pencalonan istri kepala daerah petahana, lebih menggejala dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Setelah mempertimbangkan arti penting kajian penyalahgunaan kewenangan dalam politik lokal di Indonesia, baik secara teori maupun praktik, penelitian ini mengajukan tiga permasalahan: Bagaimanakah para aktor individual dan kolektiva membangun dan menggunakan jejaring untuk praktik politik nepotisme daerah? Bagaimanakah para aktor individual dan kolektiva melakukan praktik politik nepotisme daerah? Bagaimanakah warga masyarakat menunjukkan perlawanan terhadap praktik politik nepotisme daerah?

Diskursus teoretik terkait demokrasi lokal, perilaku politik, jejaring politik, korupsi politik, politik nepotisme, disafeksi politik, dan perlawanan rakyat terlebih dulu dibahas, tidak untuk diuji sebagaimana dalam tradisi kajian positivistik, tetapi digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kepekaan teoretik, yang membantu peneliti dalam mengamati, memilah, mengelompokkan, dan menganalisis fenomena politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di sebuah kota berukuran sedang, dengan banyak lembaga pendidikan tinggi, selama lebih dari satu tahun, sejak bakal calon walikota memperkenalkan

diri kepada publik, sampai tahun pertama masa jabatan walikota dan wakil walikota terpilih berlangsung. Pendekatan dan metode dipilih sesuai maksud penelitian untuk mengembangkan teori lapangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik telaah dokumen, wawancara mendalam, dan observasi berperan-serta. Setelah dipilah, dikelompokkan dan diupayakan keabsahannya, data kemudian dianalisis dengan tiga tahapan penyandian, yakni: penyandian terbuka, penyandian pokok, dan penyandian terpilih), sebagaimana berlaku dalam tradisi penelitian teori lapangan. Secara keseluruhan, temuan-temuan penelitian direkonstruksi menjadi sejumlah proposisi, sebagai dasar pengembangan model teoretik substantif politik nepotisme, untuk kemudian ditransformasi menjadi model teoretik formal politik patronase.

Temuan-temuan yang sudah dirumuskan dan disajikan dalam sejumlah proposisi diintegrasikan ke dalam model teori lapangan substantif (Periksa Gambar 7.1). Secara rinci, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan proposisional. Pertama, perilaku aktor utama jejaring politik nepotisme daerah yang ditandai oleh praktik kekuasaan koersif, hegemonik, konspiratori, dan oligarkhis, mengakibatkan disafeksi politik temporer masyarakat, dengan ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik dan proses politik daerah.

Kedua, dikenali ada tiga ranah utama tujuan praktik politik nepotisme, yang dilakukan Nepotis atau pejabat politik petahana dalam pemilihan kepala daerah, yaitu: (1) untuk meningkatkan popularitas Nepos; (2) untuk mendapatkan legalitas Nepos, dan (3) untuk meningkatkan elektabilitas Nepos.

Ketiga, untuk meningkatkan popularitas Nepos, dilakukan melalui sejumlah siasat internal partai tempat pejabat politik Nepotis dan Nepos menjadi anggota dan pengurus, serta sejumlah siasat eksternal partai politik yang dilakukan oleh Nepotis dan Nepos.

Keempat, untuk mendapatkan legalitas pencalonan Nepos, dilakukan dengan mengerahkan tokoh politik berpengaruh, dan menegosiasi keputusan yang telah dikeluarkan pengurus pusat partai tempat Nepotis dan Nepos menjadi anggota atau pengurusnya.

Kelima, ketika Nepos gagal mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat partai, Nepotis dan Nepos berusaha membangun hubungan transaksional dengan partai politik lain yang bersedia mengajukan Nepos sebagai calon walikota, termasuk untuk mengajukan bakal calon wakil walikota pasangan Nepos.

Keenam, untuk meningkatkan elektabilitas Nepos, dilakukan dengan sejumlah tindak penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik, menyalahgunakan alokasi dan

memobilisasi sumber daya publik, menyalahgunakan fasilitas dan lembaga publik untuk kepentingan Nepos.

Ketujuh, praktik politik nepotisme, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, maupun meningkatkan elektabilitas, baik langsung maupun tidak langsung telah memicu berbagai bentuk perlawanan masyarakat. Secara bertahap bentuk perlawanan bergeser, mulai dari: (1) stigmatisasi negatif terhadap Nepotis, Nepos dan para aktor politik daerah terkait, (2) resistensi simbolik dan keseharian masyarakat dan konstituen terhadap Nepotis, Nepos dan para aktor politik daerah terkait, (3) transaksionalisasi dukungan dan pemberian suara oleh masyarakat terhadap Nepotis dan Nepos, dan akhirnya (4) resistensi elektoral dalam bentuk keengganan memilih Nepos pada hari pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah.

Dengan menghapuskan aspek-aspek substantif model teoretik pertama dan ekstrapolasi konsep spesifik politik nepotisme daerah, kajian ini juga menghasilkan dan menawarkan model teoretik formal tentang praktik politik patronase dalam pemilihan kepala daerah dan perlawanan rakyat terhadap praktik politik patronase (periksa Gambar 7.2).

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretik melalui pengajuan teori substantif baru tentang praktik politik nepotisme dan resistensi elektoral masyarakat. Secara lebih rinci, temuan penelitian ini mendukung teori faktor-faktor disafeksi politik menurut Offe (2006), memperkuat teori-teori perlawanan sosial, yang sepaham dengan teori kurva J menurut Davies (1962) dengan penerapan khusus pada demokrasi lokal, dan menjembatani teori-teori perlawanan simbolik (Scott, 1985) dengan teori-teori perlawanan politik (Popkin, 1979), yang ditandai dengan pergeseran politik patronase, dari hubungan yang bersifat moral-kultural menjadi hubungan yang bersifat transaksional-rasional.

Selain implikasi teoretik tersebut, penelitian ini juga memiliki implikasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sistem rekrutmen pejabat daerah, dan peran partai politik dalam politik daerah, dengan merekomendasikan: (1) penerbitan dan pemberlakuan aturan yang lebih ketat terkait pencalonan anggota keluarga tingkat pertama hingga tingkat ketiga, pejabat politik petahana, dan (2) penerbitan dan pemberlakuan aturan terkait posisi isteri atau suami pejabat pemerintah daerah dalam organisasi kemasyarakatan yang diprakarsai pemerintah, dan dengan organisasi pemerintah daerah, dan (3) demokratisasi partai politik untuk memastikan keefektifan perekrutan kader secara adil dan jujur untuk menghasilkan calon pemimpin politik yang idealis dan memiliki legitimasi.

Kajian ini juga mengajukan rekomendasi untuk penelitian lanjutan, yaitu: (1) studi dengan kasus serupa yang tidak hanya menggunakan teknik observasi dan wawancara terbuka, tetapi juga menerapkan teknik observasi tertutup dan wawancara, (2) studi dengan topik



yang sama, tetapi di daerah lain dan dengan masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda, (3) studi dengan pendekatan positivistik untuk menguji kesahihan eksternal model teoretik yang ditawarkan, (4) studi dengan pendekatan interpretatif untuk menemukan teori baru dari yang teori yang sudah ada dari penelitian ini, (5) studi politik nepotisme oleh elit politik nasional dan di tingkat nasional, dan (6) studi tentang praktik politik nepotisme dengan menerapkan pendekatan komparatif transnasional atau internasional.



## SUMMARY

# REGIONAL POLITICAL CORRUPTION: Network Political Studies, Political Nepotism and People's Resistance in local elections

Rachman Sidharta Arisandi

The adoption of direct local elections is intended to increase the legitimacy of the local governmental leader. The reality is, however, contaminated by the various forms of political corruption. Many local elections is not only characterized by the practice of money politics, but also indicated by the practices of political collusionism, political dynasties, and political nepotism. As the practice of money politics has been observed when the local governmental leader was elected by the Local Representatives Council, the practices of political collusionism, political dynasties, and political nepotism, such as the nomination of the incumbent local governmental leader's wife, is more observable in the direct local election.

Having considered the significance of the study of anomalies in Indonesian local politics, both in theory and practice, this research proposes three related issues: How did the individual and collective actors build and use networks for local political nepotism? How did the individual and collective actors perpetrate the local political nepotism? How citizens did showed their resistances against the practices of local political nepotism?

The theoretical discourses related to local democracy, political behavior, political network, political corruption, political nepotism, political disaffection, and

the people resistance were first discussed not to be tested as in positivist tradition, but to be functioned as *sensitizing concepts* that help the researcher in observing, sorting, classifying, and analyzing the phenomenon political nepotism in local governmental leader elections.

The research was conducted in a medium-sized town, with a lot of higher education institutions, for more than one year, since the mayoral candidates introduce themselves to the public, until the first year of tenure of the elected major and vice major. Approaches and methods were selected in accordance with the intent to develop a grounded theory. Data were gathered by applying the documentary analysis, in-depth interviews, and participatory observation techniques. Having sorted and classified, and pursued their trustworthiness, the data were analyzed by a three-step encoding processes, namely: open coding, axial coding, and selective coding, as the tradition of grounded-theory research. Overall research findings were reconstructed into a number of propositions as the basis for the development of substantive theoretical model of political nepotism, and then transformed into a formal theoretical model of political patronage.

The findings of the research were formulated and presented in a number of propositions. All of the findings and propositions have been integrated into a grounded substantive theoretical model (See Figure 7.1). In detail, this study produces some propositional conclusions. First, main actors' behavior in the network of local political nepotism that shows the characteristics of the practice of coercive, hegemonic, conspiratorial, and oligarchy power, resulted in a temporary political disaffection with the powerlessness, lack of interest, distrust, ignorance, sense of



alienation, and public cynicism towards political actors, political parties, political institutions and the process of local politics as its characteristics.

Second, the practices of political nepotism done by the nepotis or the incumbent mayor are intended to achieve three domains of objectives along the mayoral election process, namely: (1) to increase the popularity of the nepos, (2) to get the legality of nepos, and (3) to increase the electability of the nepos.

Third, in the domain of popularity the tactics covered: (1) a course of internal strategies by both the nepotis and the nepos within their party, and (2) a course of external strategies by both the nepotis and the nepos within other parties and institutions.

Fourth, in the domain of legality the tactics covered: (1) persuading the influential political prominent figures, and (2) negotiating the decision issued by the central committee of their party where both the nepotis and the nepos are the local leader and functionaries of the party.

Fifth, when the nepos failed the recommendation from the central committee of the party, both the nepotis and the nepos seek to establish a transactional relationship with other political parties that can be negotiated to nominate the nepos as a mayoral candidate, included to nominate other local politician as the vice mayoral candidate.

Sixth, in the domain of electability, the tactics were done by the nepotis through a course of abuse of authority, allocation and mobilization of public resources, facilities and institutions for the advantages of the nepos.

Seven, the practice of local political nepotism, both to increase the popularity, to get legality, as well as to improve electability by the main actors, either directly or

indirectly, lead to some form of community resistance, that shifts along with the tolerable level of the society, ranging from: (1) a variety of negative stigmatization against the nepotis and the nepos political behavior, (2) various forms of local people and constituents' symbolic resistances, (3) transactionalization support and votes by the local people to the nepotis and the nepos, and finally (4) electoral resistance in the form of unwillingness to vote for the nepos in the mayoral election.

By eliminating the substantive aspects of the first theoretical models and extrapolating the specific concepts of local political nepotism, the study offers a formal grounded theoretical model of political patronage in local governmental election and the people resistance against such practices (See Figure 7.2).

The first theoretical implication of this study relates to the new substantive theory of political nepotism and its electoral resistance, and new formal theory of political patronage and its electoral resistance. In detail, the findings of this study strengthens the theory of factors related to the political disaffection pointed out by Offe (2006), reinforces the theories of social resistance, which is congruent with Curve Theory J proposed by Davies (1962), with special application in local democracy, and linking the theories of symbolic resistance (Scott, 1985) and the theories of political resistance (Popkin, 1979), which is characterized by a shift in political patronage, from moral-cultural to transactional-rational relation.

In addition to those theoretical implications, this study also presents some policy implications for the increasing the quality of democracy, the recruitment system of local governmental leaders, and the strengthening of the role of political parties in local politics, by recommending: (1) the issuance and enforcement of rules more strictly related to the candidacy of family members of incumbent leaders,



ranging from first degree to third degree, (2) the issuance and enforcement of rules related to the position of local governmental leader's wife/husband in Non-Governmental Organization of Governmental Organization (NGOGO), and in Local Government Bureaucracy, and (3) the democratization of the political parties to ensure the effectiveness of fair and just cadre recruitment to nominate legitimate and idealist political leader candidates.

The study also suggests recommendations for further research, namely: (1) study with similar cases that does not only use overt observation and interview techniques, but also apply the techniques of covert observation and interview, (2) study with similar topics, but in other areas and with people who have different characteristics, (3) study with positivist approach to test the external validity of the offered theoretical models, (4) study with interpretive approach to discover a new theory from the previous one, (5) study of political nepotism by the national political elites at national level, and (6) study on the practices political nepotism by applying a transnational or international comparative approach.